

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia saat ini cenderung mengalami perubahan orientasi, bahkan mengarah pada persimpangan jalan. Di satu sisi pendidikan telah meningkatkan kualitas kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di sisi lain kompetensi karakter terabaikan. Sementara itu karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran dalam pendidikan tidak dikembalikan pada nilai-nilai keluhuran budi pekerti dan karakter siswa, tetapi kecenderungan masyarakat yang bersifat rasional-kapitalisme, dimana siswa setelah menyelesaikan proses pendidikan dapat segera mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang umumnya dikembalikan pada kebutuhan pasar di dunia kerja.

Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai pendidikan formal saja, melainkan lebih luas yaitu melalui kegiatan pendidikan penciptaan generasi ideal yang dituangkan dalam proses transformasi nilai, moral, norma, budaya dan sosial. Pemahaman ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat pembelajaran manusia memiliki fungsi sosial yaitu menanamkan nilai-nilai sosial dalam pergaulan sehari-hari.

Karakter bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan melalui suatu proses yang panjang. Pembentukan karakter merupakan pekerjaan yang sulit, karena terbentuknya karakter seseorang dilakukan melalui proses pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Megawangi (2004:34) mengemukakan bahwa usaha membentuk karakter yang baik bukan

pekerjaan mudah, memerlukan pendekatan yang komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis dan berkesinambungan yang dimulai sejak dari kecil di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses pembangunan karakter melalui pendidikan merupakan proses panjang dan memerlukan waktu yang lama, dimana telah menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa dari masa ke masa. Budimansyah (2009:16) menyatakan bahwa secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan. PPK yang mempunyai tujuan memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Sinergi antar-satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dibutuhkan dalam PPK yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Salah satu pokok penting dalam pelaksanaan PPK tercantum dalam Pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, PPK juga menyasar kelompok masyarakat dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

Tujuan pendidikan karakter yaitu penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu, tujuan jangka panjangnya adalah mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls natural sosial yang

diterimanya yang ada gilirannya akan mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri secara terus menerus (*on going information*) (Jamal, 2012:42).

Kondisi saat ini banyak kasus sosial yang mengarah pada krisis moral, seperti contoh maraknya penyalahgunaan narkoba, pornografi, kekerasan menjadi kasus sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Karena itu pada tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data 84% siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Adanya berbagai kasus sosial yang tidak sesuai dengan etika, atau moralitas menunjukkan rendahnya karakter generasi sekarang ini. Fenomena kenakalan remaja cukup menjadi masalah yang serius di Kota Semarang. Kenakalan yang marak terjadi di antaranya adalah tawuran pelajar, balapan liar kendaraan bermotor, pengeroyokan, pesta minuman keras, bahkan menjadi kurir ganja.

Berikut data kasus kenakalan remaja di Kota Semarang tahun 2018-2019.

Tabel 1.1

Kasus Kenakalan Remaja di Kota Semarang Tahun 2018-2019

No	Sumber	Peristiwa	Korban
1	semarang.solopos.com tanggal 26 Januari 2018	Pelajar sebuah SMA di wilayah Semarang Barat yang mencoba menantang berkelahi aparat kepolisian akibat pengaruh minuman keras (miras) jenis ciu.	Seorang pelajar mengalami luka di kepala karena terkena lemparan batu
2	tribunjateng.com tanggal 30 September 2018	Tawuran pelajar di daerah irigasi Mangkang pada Sabtu malam.	Seorang pelajar mengalami Luka serius. Pintu dan kaca mini market rusak akibat terkena lemparan batu
3	metrojateng.com Tanggal 7 Februari 2019	Pengeroyokan dilakukan terhadap seorang warga di depan warung SS, Jalan Sambiroto Raya, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, pada hari Minggu (3/2/2019).	Korban seorang pelajar warga Meteseh, Tembalang, menderita luka bacok.
4	sindonews.com Tanggal 21 Maret 2019	Remaja 17 tahun jadi kurir ganja 5kg jaringan Aceh-Semarang dikirim melalui PT POS (Persero) dalam bentuk paket.	-

Sumber: diolah oleh penulis (2020)

Keresahan inilah yang membuat Pemerintah melakukan suatu tindakan perubahan untuk memperbaiki mental generasi penerus bangsa melalui berbagai macam proses penyusunan kebijakan dan pertimbangan - pertimbangan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah mengeluarkan Permendikbud No 23 tahun 2017 Tentang Hari

Sekolah yang berujung menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan sebagian pemuka agama yang merasa peraturan tersebut kurang tepat dan sempat menimbulkan demo di berbagai daerah. Tidak ingin hal tersebut menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan kemudian Presiden Republik Indonesia mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) melalui berbagai pertimbangan. Pusat memberikan perintah kepada setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, salah satunya Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memberikan pelatihan kepada guru – guru di tiap sekolah tidak hanya Negeri saja tetapi sekolah swasta pun tak lupa untuk diperhatikan agar dapat melaksanakan program Pendidikan Penguatan Karakter. Pendidikan Penguatan Karakter atau PPK adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spriritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila.

Penguatan pendidikan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini yang ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016 dan yang terbaru saat ini adalah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Harapan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter dapat meningkatkan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter terutama Pada Pasal 2 Ayat 2 yaitu 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa namun juga memiliki adab budi pekerti, sopan santun dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jenjang Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berada di bawah kewenangan Kabupaten Kota, sebelumnya hanya mengurus Sekolah Dasar saja. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, semua tingkatan sekolah masih di dalam kewenangan Kabupaten Kota. Kewenangan tersebut berubah disaat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana kewenangan pada tingkatan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa berada pada bagian urusan Daerah Provinsi meninggalkan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar di Kabupaten Kota.

Kota Semarang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 135.362 siswa untuk Sekolah Dasar, 62.914 siswa untuk Sekolah Menengah Pertama, 28.320 untuk siswa Sekolah Menengah Atas, dan 37.305 untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan, data tersebut diambil dari Lumbung Data Pendidikan Kota Semarang. Pada data Dinas Pendidikan Kota Semarang, Semarang mempunyai kurang lebih 18 SMA Negeri, 86 SMA Swasta, 12 SMK Negeri dan 77 SMK Swasta.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. (UU Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 18 ayat 3). Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. (UU Nomor 20 Tahun 2013, Penjelasan Pasal 15).

Berdasarkan tujuan diselenggarakannya SMK bahwa tamatannya memiliki pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan sikap yang sesuai dengan budaya kerja dunia industri/usaha. Budaya kerja di dunia industri/usaha harus ditanamkan selama belajar di SMK sehingga menjadi terbiasa dan pada akhirnya menjadi karakter atau watak setiap siswa SMK.

SMK mempunyai ciri khas tentang pendidikan karakter yaitu pendidikan karakter kerja, sebagai pendidikan yang mempersiapkan lulusannya memiliki daya hati (*heart set*) kerja, baik sebagai pekerja (pegawai), bekerja sendiri (sebagai pengusaha kecil), maupun sebagai orang yang memperkerjakan orang lain.

Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan peserta didiknya menjadi manusia yang cerdas, berkarakter serta berakhlak mulia. SMK Negeri 7 Semarang dalam salah satu misinya juga yaitu membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta tiada hari tanpa prestasi. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mengutamakan aspek pengetahuan saja, namun karakter yang luhur harus ditanamkan pada peserta didik yangmana salah satunya melalui program pendidikan karakter (PPK) yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran, program pengembangan diri, dan budaya sekolah.

Pendidikan karakter telah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan termasuk SMK Negeri 7 Semarang. SMK Negeri 7 Semarang memiliki 8 (delapan) program keahlian yaitu Teknik Tenaga Listrik; Teknik Manajemen Perawatan Otomotif; Teknik Mekatronika; Teknik Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan; Teknik Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan; Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur; Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi; dan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Adapun dalam penerapan PPK bahwa SMK Negeri 7 Semarang dalam mengimplementasikan PPK telah terintegrasi dalam mata pelajaran yang tertuang dalam silabus dan RPP dalam standar kurikulumnya, yakni dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Serta pendidikan karakter juga telah dilaksanakan melalui pengembangan diri dan budaya sekolah.

Berdasarkan pra survei penelitian, mengenai pelaksanaan pendidikan karakter tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah dilakukan di salah satu SMK di Kota Semarang yaitu SMK Negeri 7 Semarang. Penulis tertarik memilih SMK Negeri 7 Semarang dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, SMK Negeri 7 Semarang merupakan sekolah dengan prolehan akreditasi A dan tergolong favorit di tingkat SMK Kota Semarang serta akan diproyeksikan menjadi sekolah internasional, hal ini memunculkan anggapan bahwa guru dan peserta didik maupun segala yang berhubungan dengan sekolah memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, siswa SMK Negeri 7 Semarang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 tercatat tidak terjadi kasus kenakalan remaja yang terjadi (Wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Guru SMK Negeri 7 Semarang). Adapun pengamalan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang juga telah jauh diimplementasikan sebelum adanya regulasi baku mengenai PPK terhadap satuan pendidikan. Dikarenakan SMK Negeri 7 Semarang merupakan sekolah menengah kejuruan, pihak sekolah berupa Pengawas Bidang

Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan Guru juga melakukan peran aktif dalam pelaksanaan PPK dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Selain itu SMK Negeri 7 Semarang juga melakukan koordinasi langsung dengan orang tua murid terhadap upaya optimalisasi PPK. Hal tersebut dikarenakan pendidikan karakter merupakan sentuhan kebiasaan yang memang harus dilaksanakan terus-menerus melalui peran kontrol masing-masing pihak.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter antara lain yaitu karakter peserta didik yang berbeda tiap-tiap tahunnya, serta sekolah belum melakukan evaluasi tercapainya pendidikan karakter sehingga belum diketahui apakah optimal atau masih perlu perbaikan lagi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMK NEGERI 7 SEMARANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pendidikan karakter yang dilakukan di SMK Negeri 7 Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi program pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu administrasi publik mengenai kebijakan dalam meningkatkan pendidikan karakter terhadap siswa SMK Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan dan referensi bagi SMK di Kota Semarang khususnya bagi SMK Negeri 7 Semarang dalam memecahkan permasalahan terkait upaya menunjang kualitas pendidikan karakter siswa di sekolah.
- b. Menjadi sumber referensi bagi masyarakat terkait dengan kualitas pendidikan karakter siswa sekerta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengimplementasian pendidikan karakter siswa.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu

1. *Analisis Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMA Negeri 3 Semarang (Studi Pada Kelompok Mata Pelajaran IPS)* oleh Surasmini, Surasmini Joebagio, Hermanu. 2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan kasus tunggal karena penelitiannya hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu objek), sehingga strategi penelitian yang relevan adalah studi kasus (Case Study). Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik nontes (angket, observasi, wawancara, dan dokumen). Untuk mengecek keabsahan data digunakan triangulasi metode dan sumber. Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini, penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran IPS yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di dapati hampir berimbang antara sering dan kadang-kadang menanamkan.

2. *Implementasi Pendidikan Ramah Anak dalam Konteks Membangun Karakter Siswa di Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang* oleh Senowarsito, Senowarsito Ulumuddin, Arisul. 2012

Pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar harus menempatkan pendidikan ramah anak sebagai dasar membangun karakter siswa. Mereka setuju untuk selalu bersikap ramah terhadap siswa-siswanya. Tidak hanya itu, sekolah juga telah mengimplementasikan beberapa nilai-nilai karakter dalam visi misi sekolah, bahkan tersedia kata-kata motivasi di dinding-dinding sekolah. Kedua, bentuk-bentuk pendidikan ramah anak yang telah dilaksanakan

disekolah meliputi; ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa seperti dalam kaitannya dengan kesehatan siswa yaitu tersedianya ruang UKS, program jumat bersih, kerja bakti, dokter kecil, BIAS maupun program tanaman toga. Sedangkan di bidang lain seperti tersedianya toilet, sanitasi air untuk mencuci tangan. Namun belum semua sekolah memiliki sanitasi air maupun toilet yang bersih. Bentuk pendidikan ramah anak yang lain yaitu tersedianya perpustakaan, kantin, koperasi siswa, taman bermain siswa, dan mading. Jika dilihat dari observasi kelas, guru telah mengimplementasikan bentuk-bentuk pendidikan ramah anak seperti pemberian rasa kasih sayang, perhatian terhadap siswa-siswanya.

3. *Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan dalam Peningkatan Mutu Sekolah* oleh Silvy Eka Andiariani, Imron Arifin, Ahmad Nurabadi. 2018.

Implementasi program PPK melalui kegiatan pembiasaan dalam meningkatkan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Wlingi dimulai dengan melakukan perencanaan kegiatan melalui SPMI dan penyusunan SKL yang akan berdampak pada perubahan kurikulum, RPP, jadwal pelajaran, dan tersusunnya SOP pelaksanaan. Dimana kegiatan perencanaan ini menghasilkan kegiatan pembiasaan di 2 basis yakni basis kelas dengan kegiatan yang dilakukan adalah Membaca kitab suci; kegiatan Pra KBM yang diantaranya adalah membaca Pancasila, menyanyi Lagu Indonesia Raya dan berdoa; kemudian kegiatan Literasi, berdoa setelah pembelajaran selesai; Melaksanakan piket kebersihan kelas sebelum dan sesudah pembelajaran; dan mengucapkan salam kepada guru sebelum dan sesudah pembelajaran Membaca kitab suci; kegiatan Pra KBM yang diantaranya adalah membaca Pancasila, menyanyi Lagu Indonesia Raya dan berdoa; kemudian kegiatan Literasi, berdoa setelah pembelajaran selesai; Melaksanakan piket kebersihan kelas sebelum dan sesudah pembelajaran; dan mengucapkan salam kepada guru sebelum dan sesudah pembelajaran. Sedangkan untuk yang berbasis budaya sekolah adalah:

Bersalaman ketika bertemu guru; adanya etika dan aturan keluar masuk kelas dan sekolah dengan IKK dan IKS; Turun dari sepeda ketika memasuki gerbang sekolah; Budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun); Pelaksanaan upacara; Program adiwiyata: Kegiatan Keagamaan: sholat berjamaah dan kegiatan Madin; dan Program ASBN dan PIK-R. Dan untuk mensukseskan kegiatan pembiasaan tersebut dilibatkan seluruh komponen yang terkait dengan sekolah untuk tetap mendukung. Namun, segala hal yang mendukung juga bisa menjadi hambatan jika tidak dimaksimalkan seperti dari aspek: warga sekolah (guru, staf dan karyawan), peserta didik, sarana dan prasarana serta orang tua.

4. *Character Education is Good Education* oleh Amelia Clark.

Agar program pendidikan karakter bekerja dengan baik perlu dilaksanakan dalam kurikulum, di setiap kelas; itu harus selalu ada dan para guru dan staf harus sepenuhnya didedikasikan untuk pemodelan dan memperkuat program. Pendidikan Karakter harus diterapkan ke setiap sekolah karena tidak hanya meningkatkan kualitas sekolah tetapi juga secara drastis meningkatkan keberhasilan siswa pada berbagai tingkatan.

5. *Developing Children's Character Building Through Children Literature* oleh Umi Marfathohah. 2015.

Saat ini, pembangunan karakter pendidikan tidak hanya diberikan oleh guru di sekolah, tetapi juga dengan membaca buku yang sesuai dengan usia mereka. Kasus ini, tentu saja, memberi anak-anak sebuah pemahaman bahwa mereka hidup dikelilingi oleh manusia lain dengan karakteristik mereka. Setidaknya ada tiga bangunan karakter penting yang dapat diterapkan dalam literatur anak-anak, mereka adalah rasa hormat, tanggung jawab, dan pengendalian diri.

6. *The Effects of Character Education on Student Behavior* oleh William G. Thompson. 2002.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter mempengaruhi perilaku siswa. Studi yang terlibat: mengamati perilaku siswa; mewawancarai guru, siswa, dan orang tua untuk menentukan persepsi mereka tentang efek dari program pendidikan karakter pada perilaku siswa; dan meninjau catatan kedisiplinan untuk mengidentifikasi pola perilaku. Temuan dari penelitian ini menyarankan bahwa program pendidikan karakter dapat memiliki efek positif pada perilaku siswa.

7. *Character Education and Gifted Children* oleh Marvin W. Berkowitz dan Mary Anne Hoppe. 2009.

Komponen kunci pendidikan karakter berkualitas berbasis bukti disajikan. Kemudian karakteristik yang relevan dari siswa berbakat dieksplorasi dengan tujuan mengidentifikasi karakteristik yang menawarkan kesempatan untuk implementasi yang optimal dari praktik dan struktur pembentukan karakter di sekolah. Akhirnya, sinergi antara karakteristik siswa berbakat dan pedagogi pembentukan karakter digambarkan, menunjukkan bahwa set unik kualitas siswa berbakat menawarkan banyak peluang yang kaya untuk penerapan pendidikan karakter yang efektif untuk pendidikan berbakat.

8. *Understanding The Importance of Character Education* oleh Larson Kelli A. 2009.

Banyak sekolah di seluruh negara bagian; ini sangat merusak minoritas dari siswa, mental, emosional, fisik, dan akademis. Menenun pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah dan / atau mendorong penggunaannya dari berbagai program yang ada di luar sana mendorong lebih banyak siswa untuk berpikir tentang memperlakukan orang lain secara

berbeda. Definisi dari pendidikan karakter bisa menjadi cukup rumit karena dari banyak nilai yang diliputinya.

Menilik penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mayoritas penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana nantinya dihasilkan uraian kata-kata yang di dalamnya menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surasmini & Hermanu Joebagio meneliti kemampuan guru dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan kasus tunggal karena penelitiannya hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu objek), sehingga strategi penelitian yang relevan adalah studi kasus (Case Study). Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik nontes (angket, observasi, wawancara, dan dokumen). Untuk mengecek keabsahan data digunakan triangulasi metode dan sumber.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silvy Eka Andiarini, Imron Arifin, dan Ahmad Nurabadi meneliti bagaimana implementasi program pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dalam meningkatkan mutu sekolah. Kegiatan pembiasaan yang dimaksud disini adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan melalui SPMI dan penyusunan SKL yang akan berdampak pada perubahan kurikulum, RPP, jadwal pelajaran, dan tersusunnya SOP pelaksanaan. Dimana kegiatan perencanaan ini menghasilkan kegiatan pembiasaan di 2 basis yakni basis kelas dan basis kebudayaan. Basis kelas yaitu kegiatan pembiasaan yang dilakukan didalam kelas, sedangkan basis kebudayaan pembiasaan yang dilakukan diluar kelas.

Disisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Senowarsito Senowarsito & Arisul Ulumudin, Amelia Clark dan juga William G. Thompson, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mengetahui terjadinya suatu aspek atau fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat suatu fakta, sifat serta fenomena yang diselidiki. Fokus dari penelitian ini adalah membangun pendidikan karakter yang baik bagi siswa. Pada penelitian ini, fenomena difokuskan pada bagaimana penerapan karakter anak dalam pendidikan karakter di sekolah yang baik dan studi yang dilakukan ialah mengamati perilaku siswa; mewawancarai guru, siswa, dan orang tua untuk menentukan persepsi mereka tentang efek dari program pendidikan karakter pada perilaku siswa.

Hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Marvin W. Berkowitz and Mary Anne Hoppe dan Larson Kelli A. bertujuan mengidentifikasi karakteristik yang menawarkan kesempatan untuk implementasi yang optimal dari praktik dan struktur pembentukan karakter di sekolah dan / atau mendorong penggunaannya dari berbagai program yang ada di luar sana mendorong lebih banyak siswa untuk berpikir tentang memperlakukan orang lain secara berbeda.

Penelitian yang terakhir merupakan penelitian dari Umi Marfathonah, Ia meneliti pembangunan karakter pendidikan yang tidak hanya diberikan oleh guru di sekolah, tetapi juga dengan membaca buku yang sesuai dengan usia mereka.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengolah keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menekankan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan publik untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Pfiffner dan Presthus dalam Inu Kencana (2010) mendefinisikan administrasi publik meliputi:

(1) implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Nicholas Henry dalam Keban (2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai:

Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.

Nigro & Nigro dalam Mariati Rahman (2017) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah:

Usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.

Berdasarkan definisi dari ahli, maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan suatu ilmu dalam lingkup pemerintah yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang manajemen publik dan kebijakan publik.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry mengungkapkan bahwa ada lima paradigmadalam administrasi publik, yaitu

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakann atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip Administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting*) yang dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedangkan lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena dianggap bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Akibat munculnya paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas

karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset, operasi dsb., merupakan fokus dari paradigma ini.

5. Paradigma Administrasi sebagai Administrasi Publik

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma administrasi publik, penelitian ini mengacu pada paradigma ke-5. Paradigma ke-5 memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter, sedangkan lokusnya ialah SMK 7 Negeri Kota Semarang.

1.5.3 Kebijakan Publik

1.5.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2013) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

James E. Anderson dalam Subarsono (2013) mendefinisikan bahwa publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Menurut Nugroho (2008), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli mengenai kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah dalam upaya memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu mulai dari merumuskan sampai akhirnya melaksanakan kebijakan itu sendiri.

1.5.3.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijak (*policy problem*). *Policy issue* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bias masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahan. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung, dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki susunan yang dimulai dari penyusunan agenda yang dimana untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Lalu formulasi kebijakan yang mana masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Kemudian adopsi/legitimasi kebijakan yang bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Dan yang terakhir ada penilaian/evaluasi kebijakan.

1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik

1.5.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Leo Agustino, 2017:126).

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Dalam Budi Winarno (2007), terdapat beberapa pengertian implementasi kebijakan menurut ahli, antara lain :

- a. Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.
- b. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Udoji dalam Leo Agustino (2017:129) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahapan yang sangat penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli terkait implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana implementor harus menjalankan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik.

1.5.4.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam melakukan penelitian terhadap tahapan implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang dikemukakan oleh para pakar. Pertama, model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn memberikan penjelasan mengenai model dasar dari proses implementasi kebijakan yang meliputi enam variabel dan memiliki kaitan antara kebijakan dan kinerja. Penjelasan mengenai peran dari enam variabel Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menguraikan proses bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan, lebih mendalam oleh Winarno (2007 :155-156) antara lain :

a. Standar dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya financial dan sumber daya sarana prasarana.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena

kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan peran agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana maka seharusnya semakin besar juga agen yang dilibatkan.

d. Sikap (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan, tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar pelaksana

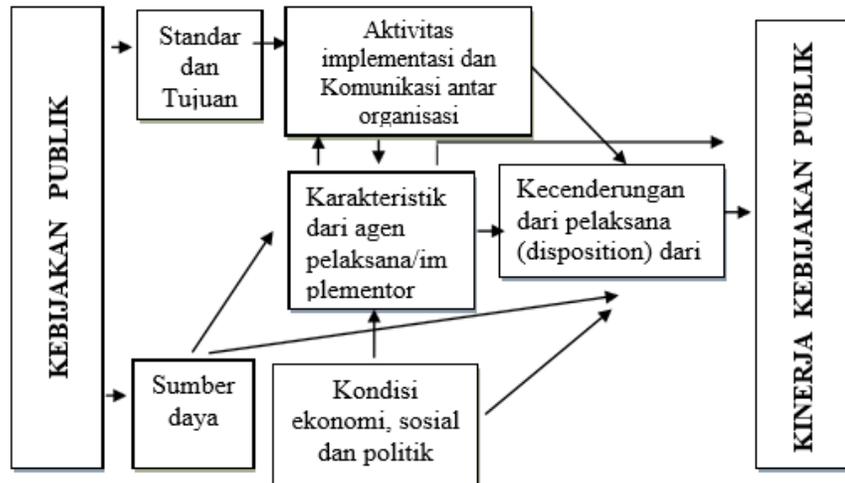
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Hal terakhir yang perlu juga di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Gambar 1.1

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber : Van

Meter dan Van Horn dalam Tahir (2011:112)

Kedua, model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Grindle dalam Leo Agustino (2017:143-145) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*. *Content of Policy* mencakup :

a. Kepentingan yang mempengaruhi

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe manfaat.

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak pengambil keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini harus sudah terdata dan terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber daya yang disediakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapa baik dan mudahnya kebijakan dan seberapa dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada

implementornya. *Context of Policy* yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah antara lain :

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari apinya.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

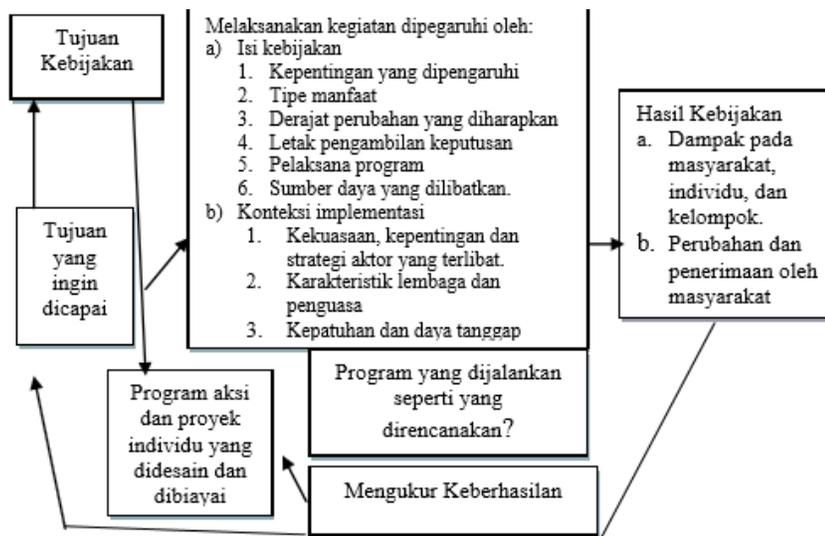
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Gambar 12

Model Implementasi Grindle



Sumber : Grindle dalam Tahir (2011:114)

Diluar variabel konten dan variabel konteks, implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle juga melihat hasil dari kebijakan berupa dampak yang dideskripsikan melalui *output*, *outcome*, dan *benefit*.

Ketiga, model yang implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2010:94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problems*).

Kategori ini mencakup beberapa variabel yang terdiri dari; tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

- b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of status to structure implementation*).

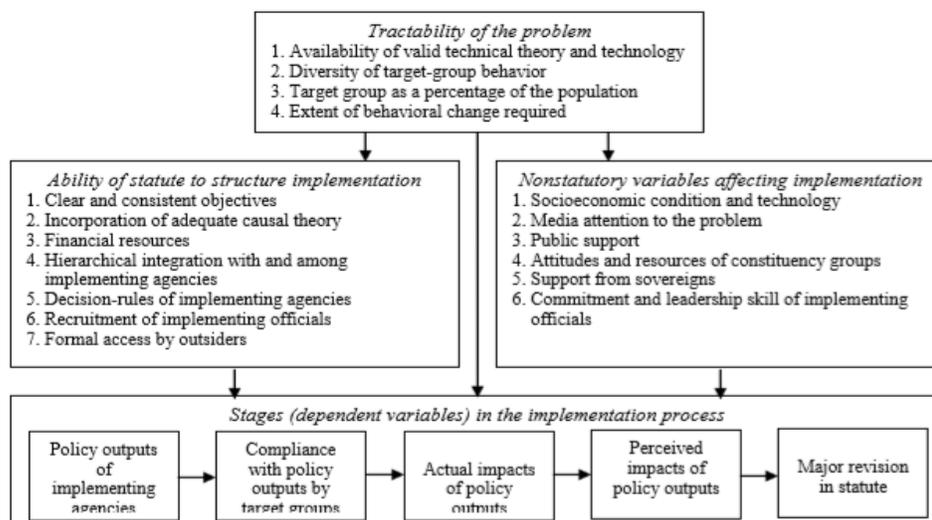
Kategori ini mencakup beberapa variabel yang terdiri dari; kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Kategori ini mencakup beberapa variabel yang terdiri dari; kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilik (Constituency Groups), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Gambar 1.3

Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier



Sumber : Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino (2017:152)

Berdasarkan deskripsi model implementasi kebijakan, penulis menggunakan model menurut Grindle untuk melihat implementasi PPK di SMK Negeri 7 Semarang.

Penulis memilih teori Grindle karena dalam penelitian ini akan menganalisis sekolah atau pihak SMK Negeri 7 Semarang sebagai pelaksana atau *implementator* PPK serta siswa SMK Negeri 7 Semarang sebagai kelompok sasaran kebijakan. Teori Grindle ingin mendeskripsikan keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari prosesnya berdasarkan kesesuaian pelaksana program dengan regulasi yang telah ada yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal dan pencapaian tujuan hasil akhir dilihat dari tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1.5.5 Pendidikan Karakter

1.5.5.1 Pengertian Pendidikan Karakter

Menurut Sriwiljeng (2017: 3) “pendidikan karakter dapat membantu mengatasi krisis moral dinegara kita”. Krisi moral yang dimaksud berupa maraknya angka kekerasan di kalangan anak dan remaja, kenakalan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obatobatan, pornografi dan perusakan property orang lain. Hal-hal tersebut merupakan bentuk masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas dan menjadi indikasi bahwa pendidikan karakter adalah kebutuhan yang penting dan pendidikan karakter diharapkan dapat di implementasikan secara sinergis di sekolah, di rumah dan di kalangan masyarakat secara umum. Dan menurut Aushop dalam (Ramdhani, 2014:7) menyatakan bahwa:

Menurut Haryanto dalam (Purwanto, 2014: 184) “karakter pendidikan merupakan upaya yang terencana untuk membuat peserta didikahui, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai yang dilakukan oleh para peserta didik”. Kemudian menurut Sweet Ph.D dalam (Zubaedi, 2011: 14) menyatakan bahwa:

Character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical value (pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia memahami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti).

Hadirnya pendidikan karakter sebagai wujud usaha secara terencana yang di maksudkan untuk mengerti dan menyadari tentang pentingnya nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Muslich (2011: 84) “Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha

Esa (YME), diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil”.

Pendapat lain menurut Kusuma dalam (Zubaedi, 2011: 19) “pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu”.

Dapat disimpulkan bahwa, pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan (*habit*) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pendidikan karakter ditentukan oleh konsistensi perilaku seseorang yang sesuai dengan apa yang diucapkan dan harus disadari atas ilmu dan pengetahuan dari sumber-sumber nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5.2 Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bertujuan membentuk dan membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi positif dan berakhlak karimah sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansif, tujuan pendidikan karakter adalah membimbing dan memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif (baik). Secara umum kata *tujuan* dalam pendidikan di Amerika memiliki beberapa istilah, antara lain *aim* (tujuan pendidikan nasional), *goal* (tujuan

institusional) dan *objective* (tujuan pembelajaran). Menurut Kennet T. Henson dalam *The Curriculum Development for Education Reform*, kata *aim*, *goal* dan *objective* memiliki perbedaan dalam stratifikasi dan ruang lingkup tujuan.

Menurut Oemar Hamalik, komponen tujuan pembelajaran meliputi: (1) tingkah laku; (2) kondisi-kondisi tes; (3) standar (ukuran) perilaku.

Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter antara lain:

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;
4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan;
5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan mengembangkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang unggul dan bermartabat.

1.5.5.3 Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Penguatan pendidikan karakter merupakan program yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah kepada seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Kemendikbud (2016: 2) “penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan perlibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)”. Menurut Sulistyowati dalam (Al-Anwari, 2014: 235) menyatakan bahwa “penyelenggaraan pendidikan pada konteks mikro berfokus kepada implementasi pendidikan karakter di sekolah”.

Pendidikan menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya dan sekolah merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memperdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus melalui proses pendidikan karakter di sekolah.

Sedangkan menurut Sriwilujeng (2017: 4) mengemukakan bahwa:

Penguatan pendidikan karakter (PPK) merupakan proses pembentukan, transformasi, dan pengembangan potensi peserta didik agar memiliki pikiran yang baik, hati yang baik, dan perilaku yang baik; sesuai dengan falsafah pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. PPK juga telah menjadi perhatian berbagai Negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata

pelajaran dan diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh dengan penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah/lembaga.

Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini (Sriwilujeng, 2017: 7):

1. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik.
2. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik.
3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia.

Gerakan penguatan pendidikan karakter ini dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu dengan pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/ komunitas yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan pendidikan karakter berbasis kelas yaitu:
 - a. Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran.
 - b. Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran.
 - c. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yaitu:
 - a. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah.
 - b. Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan.
 - c. Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah.
 - d. Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
 - e. Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah.
 - f. Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah.
3. Penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat yaitu:
 - a. Memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan.
 - b. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
 - c. Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM.

Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya.

1.5.5.4 Penguatan Pendidikan Karakter dalam Permendikbud No.20/2018

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal atau disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan Untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa dibutuhkan penguatan pendidikan karakter ini yang diwacanakan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 terutama pada Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (5):

“Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler. Kemudian pengaturan dalam Pasal 1 ayat (7) berbunyi bahwa, *“..ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.”*

Pada Pasal 2 ayat (1) :

“PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi Komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.”

Pasal 2 ayat 2 :

“Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.”

Berdasarkan pasal diatas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai karakter di Indonesia pada dasarnya terurai kedalam delapan belas nilai yang dikristalisasi menjadi lima nilai utama yang diharapkan dapat tertanam dalam diri peserta didik sejak dini sehingga implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat terwujud dan sesuai dengan harapan pemerintah terutama pada Sekolah Menengah Atas. Kelima nilai utama tersebut didasarkan pada Pancasila sehingga sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan moral generasi muda sehingga peserta didik mampu menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 4 ayat (3):

“Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.”

Pasal 6 ayat (1):

“Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: a. kelas; b. budaya sekolah; dan c. masyarakat.”

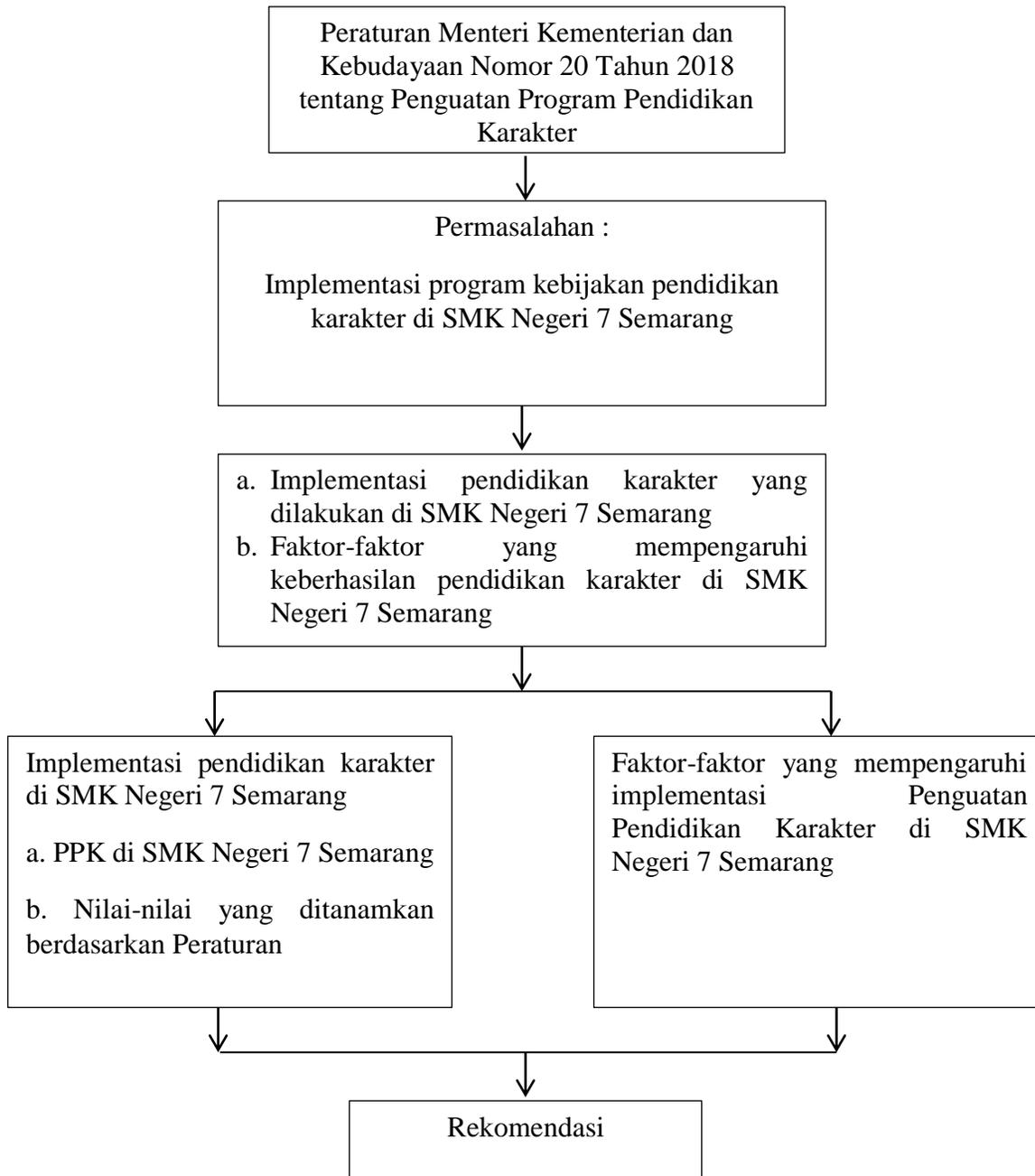
Kemudian Pasal 11 ayat (1) berbunyi bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

Melalui pasal di atas diketahui bahwa, pembentukan karakter pada peserta didik harus melalui pembiasaan yang dilakukan dalam kesehariannya. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan

dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang harus terealisasi secara nyata bagi peserta didik terlebih pada lingkungan sekolah melalui budaya sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.

Perwujudan budaya sekolah harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh elemen-elemen sekolah untuk memberikan contoh yang baik. Sehingga, contoh-contoh tersebut dapat diikuti oleh peserta didik dan menjadi suatu kebiasaan yang mengarah pada pembentukan karakter yang sesuai dengan lima nilai utama seperti religiusitas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Hubungan antara teori implementasi dengan pendidikan karakter yang diambil adalah teori dari Grindell dimana implementasi kebijakan memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, penjelasannya antara lain:

1. Kepentingan yang mempengaruhi

Kesesuaian pelaksanaan kebijakan Program Pendidikan Karakter dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

2. Tipe manfaat

Poin ini memiliki hubungan dengan *Goal* (tujuan institusional atau kelembagaan) yang dimana dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter melalui proses secara bertahap.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Poin ini memiliki hubungan dengan *aim* (tujuan nasional) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan program pendidikan karakter yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea empat, bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

4. Letak pengambilan keputusan

Letak pengambilan keputusan harus jelas dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, yaitu program pendidikan karakter

5. Pelaksana program

Poin ini memiliki hubungan dengan *objective* (tujuan pembelajaran) dimana *stakeholder* yang mendukung jalannya program kebijakan. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan harus dikuasai oleh guru. Tujuan disusun berdasarkan ciri karakteristik anak dan arah yang ingin dicapai.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung dan memadai agar pelaksanaan program pendidikan karakter berjalan dengan baik

7. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang digunakan

Strategi para aktor kepentingan yang menyelesaikan permasalahan suatu kebijakan program pendidikan karakter

8. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan program pendidikan karakter

9. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan program pendidikan karakter agar dapat berjalan dengan baik

1.8. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Implementasi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan Formal SMK Negeri 7 Semarang.

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus di SMK Negeri 7 di Kota Semarang penelitian ini berfokus pada studi kasus tentang implementasi pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter.

1.8.2 Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi. Dalam pengertian lain, informan dapat dikatakan sama dengan responden. Teknik pemilihan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, artinya teknik *sampling* yang digunakan peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009:96).

Pengambilan sampel tersebut bertujuan untuk memperoleh *key informant* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar tentang implementasi pendidikan karakter dalam mencegah kenakalan remaja SMK Negeri 7 di Kota Semarang

Dalam penelitian ini, informan yang akan menjadi narasumber penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembina Kesiswaan SMK Negeri 7;
2. Pengawas Bidang Kurikulum SMK Negeri 7 Semarang;
3. Humas SMK Negeri 7 Semarang;
4. Guru SMK Negeri 7;
5. Orang Tua Murid SMK Negeri 7;
6. Siswa SMK Negeri 7.

1.8.3 Jenis Data

Pada penelitian kualitatif ini, menggunakan jenis data yang berupa:

1. Data angka

Merupakan data yang berbentuk angka seperti persentase, jumlah, frekuensi, rata-rata, dan sebagainya.

2. Data tertulis

Merupakan data yang berbentuk uraian atau penjelasan tertulis, seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

3. Data gambar

Merupakan data yang berbentuk gambar, simbol, diagram, peta dan sebagainya.

4. Data tabel

Data yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keempat jenis data diatas agar semakin banyak data yang relevan, yang mana akan memudahkan dalam proses penelitian.

1.8.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan implementasi pendidikan karakter.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Observasi

Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang diamati tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun dengan tanya-jawab secara langsung.

3. Dokumen

Dokumen yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini dokumen terkait adalah mengenai pedoman implementasi pendidikan karakter, khususnya di SMK Negeri 7 Semarang.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, referensi, laporan, media cetak yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter di SMK Negeri 7 Semarang.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moeleong (2007:248), disebutkan bahwa Analisis Data Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berikut merupakan teknis analisis data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini:

1.8.6.1 Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan proses yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Pada awal penelitian ini penulis telah mengumpulkan beberapa data seperti data dari berbagai artikel tentang kenakalan remaja di Kota Semarang pada tahun 2018-2019 untuk meneliti bagaimana pengembangan Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kota Semarang.

1.8.6.2 Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilah, dan memfokuskan hal-hal pokok yang ada dalam data penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang masuk tidak berlebihan sehingga dapat mengaburkan persoalan utama yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8.6.3 Uji Keabsahan Data

Tahapan selanjutnya adalah menguji keabsahan data. Tahap ini dilakukan untuk menilai kredibilitas dari data yang diperoleh dan telah dipilah tersebut. Pengujian data ini dilakukan dengan metode Triangulasi. Teknik Triangulasi ini pada dasarnya merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

1.8.6.4 Penyajian Data

Pada tahap selanjutnya, data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Cara ini dinilai akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi tersebut.

1.8.6.5 Penarikan Kesimpulan

Tahapan selanjutnya yaitu dengan menarik kesimpulan sementara. Hal ini dikarenakan kesimpulan pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan dapat berubah sewaktu-waktu ketika ditemukan bukti yang kuat untuk penelitian berikutnya.

1.8.7 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Lebih lanjut Creswell dalam Jurnal Diah Wulandari (eprints.undip.ac.id/61410/) mengemukakan strategi validitas data sebagai berikut:

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan / deskripsi / tema tersebut sudah akurat.
3. Memberikan deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) di lapangan atau lokasi penelitian.

7. Melakukan tanya-jawab secara sesama rekan peneliti (*peer de briefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan (*a peer debriefer*) yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain oleh peneliti sendiri.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereview keseluruhan proyek penelitian.

Sugiyono (2006:273-274), menjelaskan menjelaskan bahwasanya terdapat tiga macam triangulasi. Ketiga Triangulasi itu antara lain adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan sumber yang sama namun dengan waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode Triangulasi sumber dan teknik untuk menguji penelitian. Penulis memilih metode triangulasi sumber karena untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dibutuhkan informan yang beragam sehingga nantinya hasil yang didapat pun tidak hanya dari satu perspektif saja melainkan dimungkinkan untuk melihat suatu fenomena pada penelitian ini dalam kacamata atau perspektif yang berbeda. Sedangkan, penulis memilih untuk menggunakan triangulasi teknik karena penulis membutuhkan data-data yang berasal bukan hanya dari informan saja melainkan dari data atau dokumen atau laporan yang dapat

penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Dengan menggunakan kedua teknik ini, nantinya data yang diperoleh pun dapat terjamin kualitas serta kredibilitasnya.